

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Deskripsi

Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini membahas tentang “***Surakarta Cultural Center Sebagai Landmark Perdamaian Multikultural dengan Pendekatan Urban Acupuncture***”, berikut penjabarannya:

*Cultural Center* :Pusat dimana masyarakat dapat berkomunikasi dan belajar mengenai kebudayaan antar etnis dalam area yang sama (KBBI).

Suatu pusat tempat pengenalan budaya hasil karya manusia (Firmaniah, 2012)

*Landmark* :Rujukan/tanda-tanda bagi pengamat untuk membedakan visual berbagai tempat (Portoeous (1977) dalam (Purwanto, 2001)).

Suatu tanda fisik pemberi informasi pengamat di luar obyek (Kevin Lynch (1960) dalam (Ndolu, Sasongko, & Reza, 2018)).

Multikultural :Perwujudan pengetahuan, kesadaran, pemahaman bertoleransi dalam perbedaan budaya yang berhubungan dengan keyakinan, pandangan dunia, sikap, konsep, dan nilai (Lawrence J. Saha dan Aly (2005) dalam (Zuriah, 2011)).

Keberagaman budaya yang berada di depan, belakang, maupun sekitar kita (UNESCO dalam (Hendro, 2013)).

*Urban Acupuncture* :Konsep yang menggabungkan antara permasalahan sosial dengan perancangan kota yang berpengaruh besar (Casagrande, 2015).

Kegiatan kota yang mengembalikan kota berfungsi normal untuk meningkatkan sense of place dan

memperhatikan *local knowledge* dalam mendesainnya (Ghina & Setiawan, 2018).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa “***Surakarta Cultural Center Sebagai Landmark Perdamaian Multikultural dengan Pendekatan Urban Acupuncture***” merupakan upaya untuk mencapai kerukunan dan simbol multikultural di Kota Surakarta yang didesain dengan teknik *urban acupuncture*.

## **1.2. Latar Belakang**

### **1.2.1. Kondisi Era Orde Baru di Indonesia dan Kota Surakarta**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya. Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai tempat berdagang dan berlayar bagi orang-orang Eropa dan Asia. Mereka membaaur dengan daerah setempat. Pada waktu itu, penguasaan teknologi baru merupakan tantangan dan respon penentuan nasib sendiri. Manusia memang makhluk yang berbudaya dan kreatif. Hal ini memunculkan simbol ikatan mereka. Pada abad ke-19 terdapat pengaman politik kolonial berupa kebijakan pemisahan penduduk lokal dan diskriminatif sehingga menghancurkan ikatan sosial yang sudah terjalin di Kota Surakarta. Pada era Sokarno dan Soeharto tidak mengatur ulang kembali struktur sosial multietnis. Hal itu pula menjadi konflik terpendam (Joebagio, 2017).

Menurut Amalados (2001) dalam (Joebagio, 2017) mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memfasilitasi konektivitas antar pulau dan mengembangkan politik identitas sebagai sarana perdamaian antar pulau. Politik identitas sendiri merupakan sebuah gerakan penumbuh pengakuan dan pemikiran demokratis terhadap intoleransi, rasisme, dan kekerasan terhadap budaya lokal.

Buruknya pengakuan mengakibatkan agama dan budaya tertindas. Faktor penyebab multiras, multireligius, dan multietnis belum mengarah atau menuju ke politik identitas adalah masyarakat melihat budaya lokal dari segi agama, ras, dan etnis sehingga menciptakan stigma baru, menolak tradisi dan budaya setempat (Joebagio, 2017).

Matri Jaladi merupakan strategi politik yang diharapkan Soeharto untuk menstabilkan politik sosial dan keamanan pemerintah. Strategi yang diinginkan

sangat dilematis. Dia menginginkan agar primordial dan konflik yang terpendam ditekan tetapi ada juga perbedaan dihilangkan untuk keseragaman. Politik keseragaman telah menghancurkan keanekaragaman sehingga memicu konflik multietnis (Joebagio, 2017).

Demokrasi yang dilakukan berupa mengkritik kebijakan pemerintah dan menghancurkan diskriminatif. Pemerintah demokratis yang diinginkan masyarakat lebih menekankan persuasif dan bebas berpendapat. Kota Surakarta memang sudah dikatakan sebagai kota multietnis yang penduduknya dari Jawa, Bali, Madura, Banjar, Tionghoa, India, dan Arab dengan berdagang dan bertani. Karakteristik multietnis sudah kelihatan atau muncul terutama pada pemukimannya. Munculnya segregasi yang merupakan keamanan dan pencegahan konflik antar etnis oleh Belanda dianggap masyarakat pribumi sebagai diskriminasi walaupun kegiatan tetap berjalan. Keterbukaan ini merugikan keseragaman politik. Hal ini menekan para elit dan cendekiawan Islam minggir. Menurut Buchori (2009), strategi tersebut merupakan penghinaan martabat mereka (Joebagio, 2017).

Salah satu contoh menunjukkan adanya ketegangan antara etnis Tionghoa dengan pribumi. Ketegangan tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lainnya atau lebih dikenal dengan diskriminasi. Penyebabnya berupa etnis Tionghoa mempunyai negeri leluhur, mereka tidak diakui sebagai bangsa Indonesia, dan mereka menyebar sekaligus tidak mempunyai daerah tinggal tetap. Awalnya para etnis Tionghoa dianjurkan untuk berbaur dengan masyarakat tetapi munculnya Inpres No.14 Tahun 1967 membuat sulit etnis Tionghoa melakukan kegiatan adat istiadatnya. Hal ini diperparah dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/BA.01.2/4683/95 pada tahun 1978 berupa agama Khong Hu Chu tidak diakui sebagai agama di Indonesia. (Fittrya & Purwaningsih, 2013).

Inpres No. 14 Tahun 1967 berdampak pada kehidupan etnis Tionghoa di Kota Surakarta. Mereka dibatasi untuk beribadah di klenteng, akhirnya satu per satu pindah agama. Penutupan sekolah Tionghoa pun dilakukan. Hal tersebut membuat para keturunannya kurang paham terhadap budaya dan bahasa maupun agamanya (Istanabi, Roychansyah, & Swasto, 2018).

### **1.2.2. Kondisi Era Reformasi di Kota Surakarta**

Pasca kerusuhan yang terjadi, titik cahaya mulai muncul. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Jabatan presiden diberikan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Sehari sebelumnya masyarakat dan mahasiswa di Kota Surakarta menduduki Balaikota Surakarta setelah mengetahui Presiden Soeharto mundur, mereka langsung sujud syukur (Noegroho, 1998). Tahun terus berganti dan bertambah, kebudayaan etnis Tionghoa kembali cerah. Agama Khong Hu Chu mulai diakui (Wibowo, 2010). Pasca kejadian itu munculah komunitas barongsai Tri Pusaka, komunitas orang Tionghoa, media, maupun terjadinya asimilasi kebudayaan (Istanabi, Roychansyah, & Swasto, 2018).

Selain itu, untuk memulihkan perekonomian Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan publik dengan aspek pendidikan ekonomi sehingga para investor mulai percaya untuk berinvestasi lagi di Kota Surakarta (Santoso D. , 2008).

Menurut Sarumpaet (2016) dalam (Joebagio, 2017) menjelaskan bahwa di sisi lain reformasi lebih mengedepankan kekerasan agama dan etnis. Mereka membersihkan orang asing dari kafe, hotel, dan pub. Implikasi amnesia yang lama merupakan euforia yang ditandai kekerasan dalam menghadapi krisis budaya.

Simbol kekerasan agama digunakan untuk mendapatkan simpati dari umat Islam lain (Joebagio, 2017). Menurut Sjaf (2014) dalam (Joebagio, 2017) menyatakan bahwa kearifan lokal belum disadari masyarakat dalam simbol di ruang publik sebagai pondasi pengembangan masyarakat.

Abdurahman Wahid dalam (Joebagio, 2017) menyarankan Islam butuh demokrasi untuk membuat kehidupan komunitas berupa kesetaraan antara Muslim dan Non-Muslim, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan Pancasila sebagai filosofi negara. Kedaulatan rakyat merupakan kunci demokrasi yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Personifikasi etika sosial terkandung moral dan etika politik sesuai perspektif Islam (Joebagio, 2017).

Para petinggi lokal dan nasional belum mengerti keterbukaan politik pada masa transisi politik nasional. Sangat penting mempunyai interaksi sosial (Joebagio, 2017). Menurut Pemkot Surakarta (2012) dalam (Haryanto, 2015) menjelaskan

bahwa umat Islam mendominasi urusan masalah sosial. Sebagai Walikota Surakarta, FX Hadirudyatmono, dia menyatakan Kota Surakarta adalah Kota Shalawat. Menurut Aijudin (2009) dalam (Haryanto, 2015) mengatakan bahwa setelah itu muncul gerakan Islam garis keras yang menciptakan kelompok paramiliter yaitu Laskar Jundullah, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, Laskar Salamah, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), HTI, Forum Umat Islam Surakarta, Majelis Al-Islah dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Barisan Bismillah, Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Zilfikar, Laskar Salamah, Laskar Teratai Emas, Laskar Honggo Dermo, Laskar Hamas, dan Laskar Hawariyyun.

Masyarakat Kota Surakarta mempunyai berbagai identitas dan keberagaman. Kedudukan Islam dan Jawa dipandang bermacam-macam. Jadi, identitas sosial yang dimiliki menjadi pembeda dan menentukan untuk berelasi dengan kelompok yang dipilihnya (Haryanto, 2015).

### **1.2.3. Peristiwa Konflik di Kota Surakarta**

Etnis Jawa merupakan mayoritas di Jawa Tengah tak kecuali di Kota Surakarta. Hubungan antar etnis cukup harmonis tetapi hubungan etnis Tionghoa dengan pribumi (Hendro, 2013). Banyak sekali konfliknya sehingga dikenal sebagai kota bersumbu pendek (Baidhawry, 2010).

Contoh pertama, 14-15 Mei 1998 merupakan konflik Jawa-Tionghoa. Kerusuhan ini peristiwa terbesar di Kota Surakarta (Baidhawry, 2010). Mei 98 merupakan puncak dari kerusuhan. Akibatnya Indonesia menjadi lumpuh. Masyarakat menuntut agar dilakukannya reformasi. Hal tersebut memicu terjadinya kerusuhan. Ada bangunan yang terdampak kerusuhan. Contoh bangunannya adalah supermarket, *dealer*, pertokoan, hotel, bank, restoran, pemukiman, bioskop, teater, dan fasilitas lainnya. Bangunan tersebut dibakar oleh massa. Kerugian material mencapai miliaran rupiah (Noegroho, 1998).

Faktor kultural antara etnis Jawa-Tionghoa adalah pertikaian *latent*. Mereka terikat dengan nilai-nilai budaya yang berbeda sehingga memunculkan prasangka atau kecurigaan dan diskriminasi. Tionghoa dianggap berdagang dengan cara-cara yang tidak disukai tetapi semuanya tidak benar. Tionghoa yang sudah tinggal lama

mempunyai karakter yang berbeda, mereka dianggap seperti itu karena belum membaaur dengan masyarakat lokal (Baidhawry, 2010).

Contoh Kedua, konflik politik Keraton. Seperti yang dijelaskan KRHT Wirodiningrat bahwa keratin mempunyai tujuh dimensi yaitu kerajaan, kekuasaan raja (kenegaran dan magis-religius), istana, penjelmaan wahyu nubuwat, mengartikan perjalanan jiwa ke arah sempurna, badan, dan lembaga sejarah kebudayaan. Dimensi tersebut sulit dipenuhi oleh Keraton Kasunanan Surakarta karena kekuasaan dibagi menjadi dua (Kasunanan dan Mangkunegaran) sehingga kurang kuat mengatur masyarakat (Baidhawry, 2010).

Pasca kemunculan reformasi, pamor keraton menurun karena perebutan tahta antara Hangabehi dengan Tedjowulan pada tahun 2004-2005. Mereka memiliki gelar yang sama sedangkan tempat tinggalnya yang berbeda (Hangabehi di dalam istana, Tedjowulan di luar istana). Soemanto pernah mengatakan bahwa regenerasi keraton diberi kepada yang paling tua. Tedjowulan menganggap dirinya lebih pantas karena berlatar belakang militer tetapi sulit diwujudkan karena kepentingan kelompok atau pribadi (Baidhawry, 2010).

Pada tanggal 29 Agustus 2005, mereka berdua bertemu. Keraton merupakan panutan masyarakat sekitarnya sehingga pemimpin dijunjung tinggi tetapi akibat gaya hidup, petinggi Keraton Surakarta tidak lagi berkharisma sebagaimana semestinya (Baidhawry, 2010).

Contoh ketiga, konflik Islam-Kristen. Pasca kemunculan reformasi, organisasi-organisasi islam terbentuk dengan kecenderungan radikal. Ada masalah atau isu di Kota Surakarta berupa kristenisasi. Bebarengan gerakan radikal munculah konflik Islam-Kristen. Beberapa kasus yang terjadi seperti kasus pemutaran film oleh LPMI, kasus Pendeta Wilson, pembubaran warung murah peduli kasih, dan kasus rumah ibadah pendeta Syarif Hidayatullah (Baidhawry, 2010).

Pertikaian dilakukan oleh Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan ormas Islam dengan orang non-Muslim yang didukung oleh satgas PDI Perjuangan. Mereka melakukan mosi ke Pendeta Wilson. Awal mula konflik yaitu pernyataan Wilson yang menyebut bahwa sebelum menjadi muslim, Nabi Muhammad

beragama Kristen. Lalu Pendeta Wilson dilaporkan ke pihak kepolisian (Baidhaw, 2010).

Laskar Hizbullah Surakarta mendatangi radio PTPN Rasitania pada hari Minggu, 29 April 2001. Mereka meminta klarifikasi tentang pemutaran film “Patriot” yang dibarengi pembagian kaset dan angket kuis yang berisi ajaran agama Kristen. Disisi lain, ada penafsiran kegiatan mempengaruhi agama lain dengan acara “Show untuk Pelajar dan Mahasiswa” pada hari Kamis, 26 April 2001. Menurut Komandan Hizbullah mengatakan bahwa tindakan ini dapat menimbulkan keresahan karena mempengaruhi keyakinan agama lain. Menurut Budiyoko mengatakan bahwa masih ada enam stasiun radio lainnya bukan hanya stasiun radionya yang dititipi oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) yang berfokus pembinaan religius (Baidhaw, 2010).

Beberapa polisi mendatangi dan menyita kaset dan angket kuis di Kantor Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) di Kampung Guasari, Jebres, Kota Surakarta pada hari Senin, 30 April 2001. Pada malam itu juga kelompok Islam garis keras telah berkumpul mau menyerang Kantor Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI). Polisi Surakarta mengatakan bahwa acuan pijakan hukumnya adalah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan SK Menteri Agama, No 70 tahun 1978. Sanksinya hanya membubarkan tindakan tersebut. Kemudian Koordinator LPMI Surakarta, Prayitno Dwi Nugroho dan Andreas Arianto meminta maaf atas tindakan yang dilakukannya (Baidhaw, 2010).

Pada waktu lain, 3 September 2005, Forum Koalisi Umat Islam Surakarta menyegel rumah untuk gereja yang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah. Kemudian Poltabes Surakarta juga meminta kepada pengurus Gereja Kristen Jawa (GKJ) Manahan untuk tidak melakukan kegiatan penjualan paket buka Rp 500,- karena ada masyarakat yang tidak setuju. Pendeta ratih mengatakan bahwa akan ada kegiatan kemanusiaan untuk orang tidak mampu (Baidhaw, 2010).

#### **1.2.4. *Urban Acupuncture***

Adanya kerusakan juga mengakibatkan bangunan di Kota Surakarta menjadi kaku dan tertutup, perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah konsep *Urban Acupuncture*. *Urban Acupuncture* adalah konsep yang

menggabungkan antara permasalahan sosial dengan perancangan kota. Konsep ini diadaptasi dari pengobatan tradisional Tiongkok yaitu teknik akupunktur. Teknik ini bertujuan untuk mempengaruhi dalam skala kecil menjadi besar atau luas (Casagrande, 2015)

Isu yang diangkat kali ini merupakan isu sejarah. Sejarah memanglah masa lalu, pahit atau manis itulah sejarah. Sejarah merupakan kenangan yang harus dipelajari untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Sebagai kota multietnis, Kota Surakarta sudah melewati berbagai konflik. Kerukunan antar etnis pun terganggu. Hal tersebut melumpuhkan kegiatan masyarakatnya.

Ada alasan dibalik semua itu yaitu Kota Surakarta yang mempunyai beberapa konflik belum mencoba menerapkan teknik *Urban Acupuncture* dalam pembangunannya. Sudah saatnya untuk membuka kesadaran masyarakat untuk saling terbuka bahwa Kota Surakarta mempunyai identitas sosial yang tinggi.

#### **1.2.5. *Image of The City***

Konsep *urban acupuncture* ini dilakukan untuk mengubah maupun mengobati kondisi Kota Surakarta saat ini. Bangunan-bangunan yang kaku dan tertutup diubah menjadi dinamis dan terbuka. Hal tersebut akan membuka kulturasi antar multietnis di masa yang akan datang menjadi landmark Kota Surakarta.

Dalam memfasilitasi dan mendukung kearifan lokal yang ada maupun potensi multikultural maupun multietnis maka harus dirancang sebuah tempat dimana para masyarakat yang bermultietnis bisa memahami dan saling berhubungan dengan satu sama yang lain. Kawasan yang cocok adalah *cultural center* karena kawasan tersebut dapat menciptakan sebuah kerukunan antar umat sehingga terjadilah perdamaian.

Perdamaian tidak terjadi bila masyarakat tidak saling mendukung. Hubungan timbal-balik antar warga pun sangat penting. Hubungan tersebut bisa memberikan citra kota. Citra kota ini berhubungan dengan identitas, struktur, dan makna. Makna dilihat dari dimensi simbolik, fungsional, emosional, historik, budaya, politik (Purwanto, 2001).



### 1.3. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep perancangan *Surakarta Cultural Center* sebagai *landmark* perdamaian multikultural dengan pendekatan *urban acupuncture*?

### 1.4. Tujuan

1. Merancang konsep *Surakarta Cultural Center*.
2. Menjadikan *Surakarta Cultural Center* sebagai *landmark* Kota Surakarta yang berfokus pada perdamaian multikultural.
3. Menerapkan teknik *urban acupuncture* di Kota Surakarta.

### 1.5. Luaran

Luaran yang dihasilkan berupa konsep *Surakarta Cultural Center* yang dapat mengubah perspektif multikultural sebagai simbol perdamaian dengan teknik *urban acupuncture*.

### 1.6. Manfaat

1. Menemukan konsep yang cocok untuk *Surakarta Cultural Center* sebagai simbol perdamaian umat.
2. Sebagai contoh bangunan dengan pendekatan *urban acupuncture* di Kota Surakarta.
3. Menambah wawasan tentang *urban acupuncture*.

## 1.7. Batasan Dan Lingkup Pembahasan

Adapun batasan-batasan dalam merancang *Surakarta Cultural Center* ini yaitu :

### 1.7.1. Lokasi



Gambar 1.1 Peta Kota Surakarta

Sumber: (Google Inc., Kota Surakarta, 2020)

### 1.7.2. Lingkup Pembahasan

Pembahasan *Surakarta Cultural Center* hanya terfokus pada perdamaian antar umat di Kota Surakarta.

## 1.8. Metode Pembahasan

Adapun metode yang digunakan dalam merancang laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini yaitu :

### 1.8.1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan merupakan kegiatan pencarian data dengan cara datang langsung di daerah Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta. Kegiatan yang dilakukan berupa mengamati kondisi saat ini dan peristiwa yang terjadi di sekitaran site.

### 1.8.2. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kajian terhadap artikel di media, jurnal, dan dokumentasi terkait dengan konflik multikultural, *cultural center*, dan *urban acupuncture*.

### 1.8.3. Analisa Site

Analisa site merupakan kegiatan penguraian data-data yang ada di dalam site maupun di luar site. Data tersebut digunakan untuk sebagai acuan dalam merancang konsep desain *Surakarta Cultural Center*.

## 1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan gambaran awal suatu topik yang diangkat. Bab ini berisi tentang deskripsi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan multikultural Kota Surakarta.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori dan dasar-dasar yang berkaitan dengan judul sesuai tema multikultural. Bab ini menguraikan beberapa pustaka maupun teori sebagai acuan dalam merancang/mendesain *Surakarta Cultural Center*.

### BAB III GAMBARAN LOKASI DAN PERENCANAAN

Bab ini mengenalkan data lokasi, permasalahan sosial yang terjadi, potensi maupun kondisi Kota Surakarta saat ini. Gagasan konsep disesuaikan dengan topik multikultural dan *urban acupuncture*.

#### BAB IV ANALISIS KONSEP PERANCANGAN

Bab ini berisikan tentang analisa konsep makro, meso, dan mikro *Surakarta Cultural Center*. Analisis yang dilakukan berupa analisis site, zoning, kebutuhan ruang, tata masa, konteks sekitar hingga pendekatan *urban acupuncture*.